

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Sayyed Taqi Rohmatullah¹, Kiagus Z.A.², Sri Hartaty³

1,2,3 Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Indonesia

E-mail: sayyedtaqir@gmail.com, zainalarifin0413@gmail.com, atik.hasyim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Populasi pada penelitian ini meliputi 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 32 provinsi sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal. Secara parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Kata Kunci : PAD, DAU, SiLPA, belanja modal.

Abstract

This study aims to determine the influence of regional original revenue, general allocation funds and excess of budget calculations on capital expenditures in provincial governments in Indonesia in 2017-2021. The population in this study covers 34 provinces in Indonesia. This study used purposive sampling method so that 32 provinces were obtained as research samples. The data used in this research is secondary data in the form of Budget Realization Reports for provincial governments in Indonesia. This study uses multiple regression analysis. The results of this study indicate that simultaneously local revenue, general allocation funds and excess budget calculations have a positive effect on capital expenditures. Partially, local revenue, general allocation funds and the remainder of the budget calculation have a positive effect on capital expenditures.

Keywords: PAD, DAU, SiLPA, capital expenditures.

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap daerah menerima otoritas yang luas untuk mengelola keuangannya sendiri dan mengelolanya sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap daerah berhak memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya ke anggaran dengan mematuhi asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Alokasi sumber daya sebagai belanja modal sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di daerah sebagai pendapatan daerah dan biaya belanja daerah dalam bentuk pelayanan publik. Setiap daerah memiliki biaya yang berbeda dalam setiap kegiatan pemerintahan, dan keadaan ini menyebabkan perbedaan keuangan antara masing-masing daerah. Untuk mengatasi perbedaan keuangan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana dari APBN untuk pelaksanaan desentralisasi biaya belanja daerah dalam rangka koordinasi penyaluran sesuai dengan urusan pemerintahan.

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong perekonomian adalah meningkatkan investasi, yang dapat

dicapai dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah diperlukan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Salah satunya dengan memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor yang produktif di wilayah tersebut. Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dimaksudkan untuk dapat memperbaiki pemerataan perimbangan keuangan yang ditimbulkan oleh bagi hasil sumber daya alam tersebut. DAU sendiri ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN (Mentayani & Rusmanto,2013).

Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk membiayai kegiatannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Tabel 1 yang merupakan data PAD dan belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2020-2021.

Tabel 1 PAD dan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2021
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Provinsi	PAD		Belanja Modal	
		2020	2021	2020	2021
1	Aceh	2.570.780	2.505.890	1.755.470	2.199.330
2	Sumatera Utara	5.531.240	6.402.710	1.497.940	1.141.200
3	Sumatera Barat	736.890	2.551.900	2.255.070	666.350
4	Riau	3.333.180	4.050.470	919.250	1.018.460
5	Kepulauan Riau	1.195.640	1.375.770	586.610	1.375.770
6	Jambi	1.535.180	1.843.430	642.700	449.690
7	Sumatera Selatan	3.375.100	121.590	1.664.700	1.836.830
8	Kep. Bangka Belitung	683.430	895.760	436.500	428.650
9	Bengkulu	712.350	984.420	417.100	324.340
10	Lampung	336.130	3.249.670	752.530	849.690
11	DKI Jakarta	37.414.750	41.606.310	3.173.220	6.865.830
12	Banten	5.906.540	7.010.370	994.260	1.297.230
13	Jawa Barat	18.521.880	20.333.680	1.672.910	2.045.430
14	Jawa Tengah	18.521.880	14.695.470	1.672.910	1.447.620
15	DI Yogyakarta	1.876.710	1.900.920	940.630	654.840
16	Jawa Timur	17.951.000	18.935.890	1.904.560	1.969.920
17	Bali	3.069.470	3.117.070	458.450	839.010
18	Nusa Tenggara Barat	1.815.690	1.888.460	608.300	771.280
19	Nusa Tenggara Timur	1.166.570	1.238.030	1.026.790	903.260
20	Kalimantan Barat	2.154.150	2.507.320	759.260	927.110
21	Kalimantan Timur	5.289.230	6.111.920	1.066.610	1.514.470
22	Kalimantan Selatan	2.940.400	3.564.910	778.100	956.160
23	Kalimantan Tengah	1.570.140	1.851.580	1.108.300	872.470
24	Kalimantan Utara	557.650	677.800	665.170	390.900
25	Sulawesi Utara	1.125.320	1.310.530	1.090.980	1.031.250
26	Gorontalo	414.860	510.800	199.800	176.340
27	Sulawesi Tengah	1.122.670	1.494.250	665.440	500.900
28	Sulawesi Barat	346.860	408.000	347.280	402.870
29	Sulawesi Selatan	3.890.210	4.469.110	1.195.020	1.459.720
30	Sulawesi Tenggara	1.017.140	1.373.790	1.048.330	1.246.770
31	Maluku	545.750	545.750	591.450	591.450

No.	Provinsi	PAD		Belanja Modal	
		2020	2021	2020	2021
32	Maluku Utara	447.290	552.350	571.750	821.980
33	Papua Barat	485.370	483.950	1.543.170	2.435.060
34	Papua	1.388.510	2.139.690	839.210	1.116.370
Rata-Rata		4.398.528	4.785.575	1.054.405	1.221.428

Sumber: BPK RI, Tahun 2020-2021

Rata-rata PAD pada pemerintah provinsi di Indonesia mengalami kenaikan dilihat dari tahun 2020 sebesar Rp4,3 triliun dan tahun 2021 menunjukkan angka sebesar Rp4,7 triliun dan belanja modal mengalami kenaikan, pada tahun 2020 mencapai Rp1,05 triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp1,2 triliun. Dilihat dari PAD pada provinsi Lampung mengalami peningkatan yaitu di tahun 2020 sebesar Rp336 miliar dan di tahun 2021 mencapai Rp3,2 triliun dan belanja modal mengalami kenaikan tahun 2020 mencapai Rp752 juta dan di tahun 2021 sebesar Rp849 miliar. Hal yang sama juga terjadi pada provinsi DKI Jakarta, PAD di tahun 2020 sebesar Rp37,4 triliun dan di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp41,6 triliun, sedangkan belanja modal di tahun 2020 sebesar Rp3,1 triliun dan di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp 6,8 triliun. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2020-2021 dalam Laporan Realisasi Anggaran. DAU dan SiLPA pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 DAU dan SiLPA pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2021
 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Provinsi	DAU		SiLPA	
		2020	2021	2020	2021
1	Aceh	1.961.334	2.010.367	2.846.140	3.969.610
2	Sumatera Utara	2.483.124	2.545.202	336.600	499.350
3	Sumatera Barat	1.901.922	1.949.470	332.760	261.530
4	Riau	1.439.451	1.503.538	81.220	531.680
5	Kepulauan Riau	1.101.552	1.129.091	405.370	64.410
6	Jambi	1.291.923	1.327.397	420.320	390.560
7	Sumatera Selatan	1.575.373	1.614.757	349.230	121.590
8	Kep. Bangka Belitung	943.982	970.636	219.450	49.540
9	Bengkulu	1.223.341	1.253.924	29.070	102.540
10	Lampung	1.739.916	1.783.414	2.842.290	182.640
11	DKI Jakarta	0	0	1.203.970	5.165.700
12	Banten	1.049.158	1.105.866	957.240	681.380
13	Jawa Barat	2.994.344	3.107.449	3.289.300	1.272.230
14	Jawa Tengah	3.460.064	3.546.565	3.289.300	861.380
15	DI Yogyakarta	1.234.516	1.265.379	420.570	484.450
16	Jawa Timur	3.679.167	3.771.146	4.369.340	3.699.550
17	Bali	1.210.991	1.241.266	831.860	192.860
18	Nusa Tenggara Barat	1.484.527	1.524.501	144.930	119.810
19	Nusa Tenggara Timur	1.722.181	1.783.843	282.630	68.380
20	Kalimantan Barat	1.568.574	1.624.268	577.260	313.020
21	Kalimantan Timur	834.938	856.333	2.249.380	2.953.990
22	Kalimantan Selatan	1.095.796	1.129.519	241.040	248.340
23	Kalimantan Tengah	1.442.656	1.478.722	610.950	346.960
24	Kalimantan Utara	1.083.715	1.114.975	343.470	47.250

No.	Provinsi	DAU		SiLPA	
		2020	2021	2020	2021
25	Sulawesi Utara	1.340.960	1.374.484	196.000	137.430
26	Gorontalo	946.452	971.762	62.740	134.280
27	Sulawesi Tengah	1.492.182	1.542.542	429.930	342.570
28	Sulawesi Barat	970.566	1.003.041	97.890	103.190
29	Sulawesi Selatan	2.357.591	2.416.530	72.060	388.460
30	Sulawesi Tenggara	1.459.672	1.504.815	449.960	358.470
31	Maluku	1.528.230	1.574.799	163.330	163.330
32	Maluku Utara	1.223.169	1.262.976	109.550	75.820
33	Papua Barat	1.301.320	1.350.978	3.052.790	1.825.950
34	Papua	2.333.184	2.391.513	2.744.890	3.023.010
Rata-Rata		1.572.820	1.618.561	1.001.554	858.272

Sumber: BPK RI, Tahun 2020-2021

Rata-rata DAU mengalami kenaikan sedangkan belanja modal mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2020 rata-rata DAU sebesar Rp1,5 triliun dan tahun 2021 mencapai Rp1,6 triliun. Belanja modal mengalami penurunan, pada tahun 2020 mencapai Rp1 triliun dan di tahun 2021 sebesar Rp858 miliar. Dilihat dari DAU pada provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2020 DAU Sumatera Utara sebesar Rp2,4 triliun dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp2,5 triliun sedangkan belanja modal juga mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp336 miliar dan pada tahun 2021 Rp499 miliar. Hal yang sama juga terjadi pada provinsi Lampung, DAU pada tahun 2020 sebesar Rp1,73 triliun dan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp1,78 triliun sedangkan belanja modal mengalami penurunan di tahun 2020 mencapai Rp2,8 triliun dan di tahun 2021 sebesar Rp182 miliar.

Rata-rata SiLPA dan rata-rata belanja modal bahwa SiLPA yang terjadi di pemerintah provinsi di Indonesia mengalami penurunan yaitu di tahun 2020 sebesar 1 juta dan pada tahun 2021 sebesar Rp858 miliar. Sedangkan belanja modal mengalami kenaikan, tahun 2020 mencapai Rp1 triliun dan di tahun 2021 sebesar Rp1,2 triliun. Hal ini dapat dilihat dari provinsi Jawa Barat bahwa SiLPA pada tahun 2020 sebesar Rp3,2 triliun dan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp1,2 triliun, belanja modal yang terjadi di Jawa Barat mengalami kenaikan dilihat di tahun 2020 sebesar Rp1,6 triliun dan di tahun 2021 sebesar Rp 2 triliun. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut tiap tahun cenderung meningkat. Peningkatan sumber-sumber daerah, diharapkan dapat meningkatkan anggaran belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Namun, yang terjadi adalah peningkatan sumber penerimaan daerah tidak selalu diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal pemerintah provinsi di Indonesia. Pengeluaran pemerintah daerah, khususnya untuk belanja modal rata-rata masih di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Anggaran belanja hanya terkonsentrasi pada belanja-belanja yang bersifat rutin dan mengesampingkan belanja modal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah, diperlukan perencanaan yang matang agar tujuan pemerintah daerah untuk memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat dapat tercapai. Salah satu perencanaan yang digunakan pemerintah daerah adalah dibuatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut PMK RI Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2.5 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya untuk menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal yang kapitalis aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

3 METODE PENELITIAN

Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran dan belanja modal pada pemerintah provinsi yang ada di Indonesia selama 5 Tahun periode 2017-2021 menggunakan Teknik data nonprobability sample yaitu menggunakan semua populasi yang digunakan. Populasi pada penelitian ini meliputi 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 32 provinsi sebagai sampel penelitian.

Pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji signifikansi t, dan uji signifikansi f.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dipergunakan untuk memberikan gambaran data secara deskriptif. Nilai-nilai umum dalam statistik deskriptif diantaranya ialah rata-rata, simpangan baku, nilai minimal, nilai maksimal, dan jumlah (sum). Statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian yang sudah ditransformasikan dalam bentuk LN Hasil statistik deskriptif dengan nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan nilai standar deviasi sebagai berikut:

Variabel Belanja Modal (Y) memiliki nilai minimum 12,08 diperoleh dari belanja modal provinsi Gorontalo pada tahun 2021, sedangkan nilai maksimum 14,97 diperoleh dari belanja modal provinsi Aceh pada tahun 2019, rata-rata belanja modal 13,7286 yang diperoleh dari jumlah seluruh belanja modal provinsi dibagi banyaknya jumlah data, sehingga diperoleh nilai mean (rata-rata) dari belanja modal. Diperoleh juga standar deviasi sebesar 0,59153 dengan jumlah sampel sebanyak 32 provinsi di Indonesia dan jumlah data sebanyak 160 unit, dalam kurun waktu 5 tahun (2017-2021).

Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai minimum 11,71 diperoleh dari pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2021, sedangkan nilai maksimum 16,87 diperoleh dari pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat pada tahun 2019, rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 14,4043 diperoleh dari jumlah seluruh pendapatan asli daerah provinsi dibagi banyaknya jumlah data, diperoleh juga standar deviasi sebesar 1.08954, dengan jumlah sampel sebanyak 32 provinsi di Indonesia dan jumlah data sebanyak 160 unit dalam kurun waktu 5 tahun (2017-2021).

Variabel Dana Alokasi Umum (X2) memiliki nilai minimum 13,76 diperoleh dari dana alokasi umum provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020, sedangkan nilai maksimum 15,20 diperoleh dari dana alokasi umum provinsi Jawa Timur pada tahun 2019, rata-rata dana alokasi umum sebesar 14,2894 diperoleh dari jumlah seluruh dana alokasi umum provinsi dibagi banyaknya jumlah data, diperoleh juga standar deviasi yaitu sebesar 0,35811, dengan jumlah sampel sebanyak 32 provinsi di Indonesia dan jumlah data sebanyak 160 unit, dalam kurun waktu 5 tahun (2017-2021).

Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X3) memiliki nilai minimum yaitu 9,10 diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran provinsi Maluku pada tahun 2018, sedangkan nilai maksimum 15,33 diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran provinsi Jawa Timur tahun 2019, rata-rata sisa lebih perhitungan anggaran 12,6572 diperoleh dari jumlah sisa lebih perhitungan anggaran seluruh provinsi dibagi banyaknya jumlah data, diperoleh juga standar deviasi sebesar 1,26291 dengan jumlah sampel sebanyak 32 provinsi di Indonesia dan jumlah data sebanyak 160 unit, dalam kurun waktu 5 tahun (2017-2021).

4.2 Hasil Uji Signifikasi t

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara parsial PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap belanja modal. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan uji 2 sisi. Hasil pengujian parsial terlihat pada tabel 3.

Tabel 3 Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.259	1.367		.921	.358
	X12	.105	.040	.194	2.622	.010
	X22	.635	.120	.385	5.296	<.001
	X32	.148	.030	.317	4.930	<.001

a. Dependent Variable: Y1

Sumber: Output SPSS Versi 29

Hasil penelitian dari hipotesis pertama menunjukkan secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2021. Hal tersebut ditunjukkan dari analisis variabel Pendapatan Asli Daerah yang diketahui memiliki nilai t hitung sebesar 2,622. Nilai t hitung tersebut menunjukkan angka lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,97529 atau (2,622 > 1,97529). Kemudian, nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,01, dimana hal ini menunjukkan bahwa 0,01 < 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini membuktikan naik turunnya belanja modal

di suatu daerah provinsi dipengaruhi oleh PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang baik, sehingga dengan tingginya PAD yang diperoleh maka semakin tinggi juga yang dialokasikan untuk belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Maulana & Fadhila 2020). Penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah (Marseno & Mulyani 2020) karena pendapatan asli daerah sangat penting dalam menyumbang keuangan daerah sehingga dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah, dampak dari pengeluaran tersebut yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani & Pariani (2018) menyatakan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan belum optimalnya penerimaan PAD di daerah yang tertinggal.

Hasil penelitian dari hipotesis kedua menunjukkan secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2021. Hal tersebut ditunjukkan dari analisis variabel Dana Alokasi Umum yang diketahui memiliki nilai t hitung sebesar 5,296. Nilai t hitung tersebut menunjukkan angka lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,97529 atau ($5,296 > 1,97529$). Kemudian, nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,001, dimana hal ini menunjukkan bahwa $0,001 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia. Dana alokasi umum merupakan salah satu dana transfer dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi, serta pemerintah daerah dapat digunakan untuk pelaksanaan fungsi layanan dasar umum dan dana yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah dimana daerah tersebut belum mampu memaksimalkan pendapatan asli daerahnya dikarenakan suatu hal. Untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan mendapat jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan fiskal antar daerah dalam menjalani era otonomi sekarang. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar nilai DAU yang diterima pemerintah provinsi akan menambah belanja modal.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Astuti, 2017). Berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal (Zais, 2017) karena pemanfaatan secara efektif DAU dalam jangka panjang berpengaruh terhadap pengurangan jumlah transfer yang dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Hasil penelitian dari hipotesis pertama menunjukkan secara parsial Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2021. Analisis variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang diketahui memiliki nilai t hitung sebesar 4,930. Nilai t hitung tersebut menunjukkan angka lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,97529 atau ($4,930 > 1,97529$). Kemudian, nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,001, dimana hal ini menunjukkan bahwa $0,001 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima.

Hasil penelitian menunjukkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia. Naik turunnya belanja modal dipengaruhi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada pemerintah provinsi di Indonesia. Menurut Permendagri Nomor 21 tahun 2011, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selanjutnya pada Pasal 137 sampai dengan Pasal 153, SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi

pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Berdasarkan hasil perhitungan model, diketahui bahwa SiLPA cukup besar mempengaruhi alokasi belanja modal.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal (Kosim, 2017). SiLPA yang berasal dari peningkatan kinerja pendapatan dan efisiensi belanja daerah, merupakan dana segar yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Anggaran Belanja Modal dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Semakin tinggi SiLPA maka semakin tinggi pula anggaran belanja modal.

4.3 Hasil Uji Signifikansi Uji F

Uji F yaitu uji koefisien regresi untuk mengetahui apakah variabel dependen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel independen. Dalam hal ini untuk menguji signifikansi pengaruh PAD, DAU dan SiLPA secara bersama-sama terhadap belanja modal. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik dapat dilihat dari tabel 4.

Tabel 4 Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.592	3	10.864	73.547	<,001 ^b
	Residual	23.043	156	.148		
	Total	55.635	159			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X32, X22, X12

Hasil penelitian dari hipotesis pertama menunjukkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2021. Hal tersebut ditunjukkan dari analisis variabel yang diketahui memiliki nilai F hitung sebesar 73,547. Nilai F hitung tersebut menunjukkan angka lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 2,66 atau ($73,547 > 2,66$). Kemudian, nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,001, dimana hal ini menunjukkan bahwa $0,001 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima.

PAD, DAU dan SiLPA secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan model regresi linier yang terbentuk dengan melibatkan variabel PAD, DAU dan SiLPA sangat layak untuk memprediksi variasi nilai variabel belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia. Karena pada dasarnya pengujian simultan beberapa variabel independen terhadap variabel dependen bertujuan untuk memberikan gambaran kelayakan model regresi yang dihasilkan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh secara bersama-sama dengan signifikan terhadap belanja modal (Kosim, 2017). Berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan SiLPA tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal (Aditya & Dirgantari 2017).

5. KESIMPULAN

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja modal. Setiap peningkatan pada belanja modal maka akan menyebabkan peningkatan nilai belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja modal. Sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih perhitungan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap

belanja modal dengan nilai F hitung sebesar 73,54. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD, DAU dan SiLPA yang diterima oleh pemerintah provinsi di Indonesia maka semakin besar pula belanja modal pada pemerintah provinsi tersebut.

Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen yang lain, karena kemungkinan banyak faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini juga berpengaruh terhadap belanja modal.

Pemerintah daerah provinsi di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan efisiensi pemungutan dan efisiensi administrasi pajak. Selain itu diharapkan agar lebih mengoptimalkan lagi pemanfaatan dana alokasi umum dengan tidak menggunakan seluruh dana alokasi umum untuk biaya pegawai tetapi juga digunakan untuk mendorong kemajuan di daerah. Hal ini diharapkan akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada belanja modal yang bersifat produktif. Dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran diharapkan pemerintah provinsi di Indonesia bisa mengalokasikan ke belanja modal agar dana yang diperoleh untuk belanja modal akan meningkat sehingga pembangunan terhadap infrastruktur juga meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Y.N., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen*. Vol. Xv No.1.
- Astuti, N. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Awaniz, B. N. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Eks Karasidenan Pekalongan. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Fauzi, F., Dencik, A.B., & Asiati, D. (2019). *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen Dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2016.
- Hoesada, J. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasdy, L.M., Nadirsyah, & Fahlevi, H. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal dan Implikasinya pada Realisasi Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 4 No. 1, Maret 2018.
- Kosim, E. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar. *Journal of managementReview*. Volume 1.

- Martini, R. (2018). The Local Government Performance in Indonesia. Proceedings of the 2nd Forum in Research, Science, and Technology FIRST - Volume 1, 5-13, 2018 , Palembang, Indonesia
- Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2016- 2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 2 No 4 Seri A November 2020.
- Maulana, F., & Fadhila, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 5, No. 3.
- Mentayani, & Rusmanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota Dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. *Jurnal Infestasi* Vol.5 No.2 Desember.
- Nurhasanah, S. (2017). *Praktikum Statistika 2 Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. Permendagri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- PMK RI Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- PP RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Priyatno, D. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putra, W. (2018). *Perekonomian Indonesia: Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Santoso, S. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santy, D., Amir, A., & Wahyudi, I. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2013–2017. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*. Vol. 5.

- Sanusi, A. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanjaya, I., Martini, R., & Ahnaf, M. F. (2021, January). Fiscal Stress: Growth Aspects of PAD, Growth of Capital Expenditure, and Economic Growth. In 4th Forum in Research, Science, and Technology (FIRST-T3-20) (pp. 177-183). Atlantis Press.
- Sartika, N., Kirmizi, & Indrawati, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Dalam Struktur APBD Dan Kinerja Keuangan Daerah Yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *SOROT*. Volume 12, Nomor 2.
- Savira, I., Wijayanti, R., & Noviansyah. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia.
- Setiawan, A.B., & Andris. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akunida*. ISSN 2442-3033 Volume 5 Nomor 1.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Subianto, Yusrizal, F., & Sipatuhar. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. *Jurnal Interprof*. Vol. 6.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*. Vol 6 No 1.
- Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Yulvian, H., Martini, R., & Armaini, R. (2023). Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah: Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2585-2593.
- Zais, G. M. (2017). Faktor-faktor yang Memengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau

Kota di Provinsi Sumatera Selatan.